

Ekspansi Kredit dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Provinsi di Indonesia

Anhar Fauzan Priyono¹, Pipit Pitriyan², Heriyaldi³, Indra Maipita⁴

^{1,2,3}*Universitas Padjadjaran, Indonesia*

⁴*Universitas Negeri Medan, Indonesia*

¹*anhar.fauzan.priyono@unpad.ac.id*, ²*pipit.pitriyan@unpad.ac.id*, ³*heriyaldi@unpad.ac.id*, ⁴*imaipita@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia, dengan mengamati kredit UMKM, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, tingkat partisipasi sekolah, dan tingkat pengangguran. Dengan memanfaatkan pendekatan Fixed Effect dengan Panel Corrected Standard Error (PCSE), ditemukan bahwa kredit UMKM, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah secara signifikan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, pengangguran terbukti memiliki dampak positif pada ketimpangan pendapatan. Namun, penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, relatif terhadap periode pengamatan kami, membuat hasil pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memerlukan analisis lebih lanjut. Di lain pihak, ditemukan bahwa peningkatan distribusi kredit ke sektor UMKM dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan dan rasio pendapatan tertinggi hingga terendah, rata-rata di setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah diharapkan fokus pada anggaran pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: indeks Gini, pengeluaran pemerintah, highest to lowest income ratio, UMKM, ekspansi kredit

Credit Expansion and Its Impact on Income Inequality of the Provinces in Indonesia

Abstract

This research aims to study the determinants of income inequality at the provincial level in Indonesia, through observing MSMEs credit, government expenditure of education and health, school participation rate, and unemployment rate. We employed Fixed effect panel data, implementing Panel Corrected Standard Error (PCSE) and found that MSMEs credit, government expenditure on education, and school participation rate are significant in reducing income inequality. On the other hand, unemployment has been proven to have a positive impact on income inequality. However, implementation of National Health Insurance, relative to our period of observation, makes the result of government expenditure on health requires further analysis. Empirical result found that the increase in credit distribution to the MSME sector can reduce the level of income inequality and highest to lowest income ratio, on average in each province in Indonesia. The government is expected to focus on education and health budget to improve the community's quality of life.

Keywords: Gini Index, Government Expenditure, Highest to Lowest Income Ratio, MSMEs credit expansion, Panel data

PENDAHULUAN

Perbankan memainkan peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya pada sistem finansial. Otoritas Jasa Keuangan (2016) memberikan informasi bahwa 74% aset sektor jasa keuangan Indonesia didominasi oleh perbankan. Peranan perbankan masih dirasakan lebih besar daripada pasar modal dalam mendukung pembangunan Indonesia, khususnya dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Kondisi ini membuat pemerintah melakukan berbagai strategi untuk mendorong peranan swasta yang lebih besar, yang disadari sebagai kemampuan pemerintah yang terbatas dalam mendukung dana pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang bertujuan untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh untuk menyikapi perubahan-perubahan dalam perekonomian, baik domestik maupun global. Beberapa implementasi kebijakan tersebut diantaranya adalah penghapusan pagu kredit dan pemberhentian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada tahun 1983, Pakto 88 yang memberikan izin usaha bank baru dan memberikan kemudahan dalam mendirikan BPR. Pada tahun 1991, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pengelolaan bank dalam asas kehati-hatian, dan satu tahun berikutnya dikeluarkan UU Perbankan yang memberikan perluasan kewenangan pada BI untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. Fungsi pengawasan terhadap perbankan tersebut pada saat ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai implementasi dari UU No. 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada era pembangunan berkelanjutan saat ini, perbankan sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada pertanyaan mendasar, yaitu, peranannya terhadap ketidakmerataan pendapatan. Beberapa studi empiris menemukan hal yang berbeda tentang dampak pembangunan sektor finansial terhadap ketidakmerataan pendapatan. Di satu sisi, terdapat temuan bahwa pembangunan sektor finansial dapat menurunkan ketidakmerataan pendapatan, di sisi lain ditemukan bahwa ada indikasi ketidakberpihakan sistem finansial. Ketidakberpihakan ini disebabkan sistem finansial hanya memberikan manfaat bagi pihak yang tergolong kaya, sedangkan pihak lain tidak.

Secara teoritis, perkembangan dalam intermediasi finansial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Greenwood (1990) menyatakan bahwa mekanisme pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi melalui peningkatan dari tingkat pengembalian atas modal (*rate of return of capital*), atau dengan kata lain investasi semakin efisien. Demikian sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat membantu pengembangan sektor finansial. Namun demikian, jika stimulus finansial terhadap efisiensi investasi terjadi pada tahap awal pembangunan, perekonomian cenderung tumbuh dengan lambat. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendapatan, jika hal ini terus berlanjut maka perkembangan finansial akan semakin cepat dan luas sehingga perekonomian pun semakin berkembang pesat. Saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara orang kaya dengan orang miskin. Hal ini mengikuti pola hubungan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi Kuznet Curve.

Greenwood & Javanovic (1990) menemukan bahwa pembangunan finansial hanya memberikan manfaat bagi kaum kaya dikarenakan tingginya biaya intermediasi. Pada periode berikutnya, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan ditemukan menurun. Hubungan linier antara sistem finansial dan ketidakmerataan pendapatan juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Li et al. (1998), Clarke et al. (2003), dan Liang (2006).

Beberapa artikel empiris lainnya memanfaatkan variabel yang berbeda dalam mengetahui hubungan antara sistem finansial dan ketidakmerataan pendapatan. Clarke et

al. (2006) dan Beck et al. (2007) melakukan pendekatan atas pembangunan finansial dengan memanfaatkan variabel rasio kredit terhadap PDB. Pada konteks yang sama, Kappel (2010) menggunakan variabel kredit yang disalurkan dari pengumpulan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan, serta kapitalisasi pasar modal terhadap PDB. Di lain pihak, indikator sektor perbankan (marjin bunga) dan kapitalisasi pasar modal terhadap PDB digunakan oleh Gimet & Lagoarde-Segot (2011).

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sangat identik dengan usaha kecil. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Meyer (1998) bahwa bank umum dan usaha kecil mempunyai hubungan yang penting di mana sumber dana kredit usaha kecil berasal dari bank umum. Selain itu, usaha kecil juga menggunakan jasa perbankan tidak terbatas dalam aktivitas pinjaman dan simpanan saja. Lebih jauh lagi, manfaat keberadaan bank di dalam bisnis juga untuk aktivitas transaksi seperti transfer, pembayaran, dan sebagainya.

Definisi usaha kecil di Indonesia dikenal dengan istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat 4 kategori dunia usaha yaitu: usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Kriteria yang membedakan ke-4 dunia usaha tersebut adalah kepemilikan dari kekayaan bersih dan penjualan tahunan.

Penelitian ini secara khusus menggunakan nilai kredit mikro yang disalurkan untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dimana Bank Indonesia membagi kredit UMKM didasarkan pada definisi plafon, yaitu: (1) kredit mikro dengan plafon s.d Rp. 50 juta, (2) kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp. 50 juta s.d Rp. 500 juta, dan (3) kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp. 500 juta s.d Rp. 5 miliar. Selain itu, variabel makro ekonomi lainnya, seperti inflasi untuk mengukur kenaikan harga secara umum diteliti apakah mempunyai hubungan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian (Monnin 2014; Narob 2015) menemukan adanya pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Kedua penelitian tersebut menarik untuk dibahas karena memberikan hasil atau pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan.

Kajian empiris dari Narob (2015), menggunakan variabel koefisien GINI untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Objek penelitian tersebut terdiri dari 46 negara berkembang pada tahun 2000 sampai dengan 2012. Dengan menggunakan *dynamic panel data* melalui GMM (*generalized method of moments*), karena adanya permasalahan *endogenty* di mana terdapat hubungan linear antara inflasi dan ketimpangan pendapatan secara signifikan dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi pula. Temuan yang berbeda didapatkan dari penelitian Monnin (2014), di mana inflasi dalam jangka panjang dan ketimpangan pendapatan dapat di gambarkan dalam kurva yang berbentuk huruf U. Rendahnya inflasi berhubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan. Jika inflasi mengalami kenaikan maka akan di ikuti oleh menurunnya ketimpangan pendapatan. Namun pada titik tertentu, tingkat inflasi yang tinggi akan di ikuti oleh naiknya ketimpangan pendapatan, kondisi ini mempunyai hubungan positif. Periode sampel yang digunakan pada penelitian ini dari tahun 1971

sampai dengan 2010 dengan objek penelitian 10 negara OECD (Australia, Canada, Denmark, France, Japan, New Zealand, Norway, Sweden, United Kingdom dan the United States).

Pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal juga menjadi variabel yang diteliti. Dengan objek penelitian di negara berkembang, terutama Indonesia, Rahmayanti (2012) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi mempunyai dampak mengurangi ketimpangan pendapatan. Rekomendasi penelitiannya, bahwa pemerintah harus memperhatikan kualitas dari pengeluaran/belanja negara. Khususnya untuk negara Indonesia, selain menekankan adanya kualitas di dalam belanja negara, kualitas administrasi pemerintah juga harus diperbaiki.

Kajian terhadap pengeluaran pemerintah juga dilakukan oleh Anderson et al (2016), di mana penelitian ini memberikan fokus terhadap negara yang mempunyai pendapatan menengah dan rendah. Temuannya adalah adanya hubungan negatif yang moderat antara pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pendapatan. Hubungan yang kuat ditunjukkan oleh pengeluaran pemerintah untuk sosial/kesejahteraan yang mampu memberikan hubungan yang berlawanan dengan ketimpangan pendapatan. Mello & Tiongson (2006), memberikan hasil yang tidak berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Dengan sampel 52 negara, apabila data tersebut diplotkan antara jaminan/kesejahteraan sosial dengan ketimpangan pendapatan, maka akan memberikan kecenderungan yang negatif antara variabel tersebut. Kecenderungan kurva dengan bentuk U juga terjadi jika menggunakan ketimpangan pengeluaran. Kondisi ini hampir sama dengan penelitian Monnin (2014) tentang hubungan tingkat inflasi terhadap ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan dipengaruhi juga oleh variabel pendidikan. Beberapa penelitian, seperti Duman (2008) menggunakan *proxy* tingkat pendidikan dan juga pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Selain itu, penelitian Qazi et al (2016) menggunakan tingkat pendidikan untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ram (1989), dan Park (1996), di mana mereka menggunakan tingkat pendidikan tenaga kerja, sebagai *proxy* tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan.

METODE

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan tingkat representasi yang tinggi dengan objek penelitian. Sumber ini termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan variabel distribusi kredit mikro. Data yang berkaitan dengan ketimpangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, tingkat pendidikan, dan pengangguran, akan merujuk pada sumber-sumber gabungan, yaitu Provinsi dalam Angka (DDA), Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan juga SUSENAS.

Penelitian ini dilakukan dengan objek seluruh provinsi di Indonesia (kecuali Kalimantan Utara - sebagai provinsi terbaru di Indonesia) yang dianalisis dalam bentuk data panel, dengan periode pengamatan adalah tahun 2008 - 2015, dalam frekuensi tahunan. Beberapa alasan pemilihan periode pengamatan adalah upaya untuk menangkap

perilaku variabel yang menarik selama periode krisis keuangan. Di sisi lain, juga dapat diamati perilaku variabel ini pada saat perlambatan pertumbuhan ekonomi setelah 2012.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah pendekatan panel data ekonometrik. Spesifikasi model data panel yang akan digunakan adalah untuk menguji reliabilitas dan efisiensi pendekatan *Fixed Effect* versus *Random Effect*, dengan memanfaatkan uji spesifikasi Hausman. Perlakuan tambahan yang diberikan dalam model data panel yang dipilih adalah *Panel Corrected Standard Error* (PCSE), untuk meningkatkan kelayakan luaran model agar dapat menjadi alternatif pengambilan keputusan di tingkat regulator.

Tabel 1. Provinsi di Indonesia dalam Pengamatan

Kode	Nama Provinsi	Kode	Nama Provinsi
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam	NTB	Nusa Tenggara Barat
SUMUT	Sumatera Utara	NTT	Nusa Tenggara Timur
SUMBAR	Sumatera Barat	KALBAR	Kalimantan Barat
RIAU	Riau	KALTENG	Kalimantan Tengah
JAMBI	Jambi	KALSEL	Kalimantan Selatan
SUMSEL	Sumatera Selatan	KALTIM	Kalimantan Timur
BENGKULU	Bengkulu	SULUT	Sulawesi Utara
LAMPUNG	Lampung	SULTENG	Sulawesi Tengah
BABEL	Bangka dan Belitung	SULSEL	Sulawesi Selatan
KEPRI	Kepulauan Riau	SULTRA	Sulawesi Tenggara
DKI	DKI Jakarta	GORONTALO	Gorontalo
JABAR	Jawa Barat	SULBAR	Sulawesi Barat
JATENG	Jawa Tengah	MALUKU	Maluku
DIY	DI Yogyakarta	MALUT	Maluku Utara
JATIM	Jawa Timur	PAPBAR	Papua Barat
BANTEN	Banten	PAPUA	Papua
BALI	Bali		

Persamaan-persamaan yang kemudian diestimasi merujuk pada Beck, Kunt & Levine (2007), sebagai berikut:

$$Gini_{i,t} = \alpha_{0,i} + \alpha_1 KM_{i,t} + \alpha_2 GEDU_{i,t} + \alpha_3 GKES_{i,t} + \alpha_4 Edu_{i,t} + \alpha_5 Une_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots\dots\dots (1)$$

$$HtL_{i,t} = \beta_{0,i} + \beta_1 KM_{i,t} + \beta_2 GEDU_{i,t} + \beta_3 GKES_{i,t} + \beta_4 Edu_{i,t} + \beta_5 Une_{i,t} + z_{i,t} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan: $Gini_{i,t}$ adalah Gini index; $HtL_{i,t}$ adalah *Highest to Lowest Income Ratio*; $KM_{i,t}$ adalah rasio penyaluran penyaluran kredit UMKM terhadap PDRB; $GEDU_{i,t}$ adalah rasio pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap PDRB; $GKES_{i,t}$ adalah rasio pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap PDRB; $Edu_{i,t}$ adalah tingkat partisipasi sekolah; $Une_{i,t}$ adalah tingkat pengangguran; i adalah provinsi, dan t adalah tahun. *Highest to Lowest Income Ratio* merupakan indikator yang diteliti sebagai salah satu proksi dari ketimpangan pendapatan, di mana hal tersebut menjadi analisis tambahan dalam penelitian

ini. Indikator tersebut memperlihatkan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat dalam kategori pendapatan tertinggi dibandingkan yang paling rendah. Daftar provinsi yang menjadi unit analisis diperlihatkan pada Tabel 1.

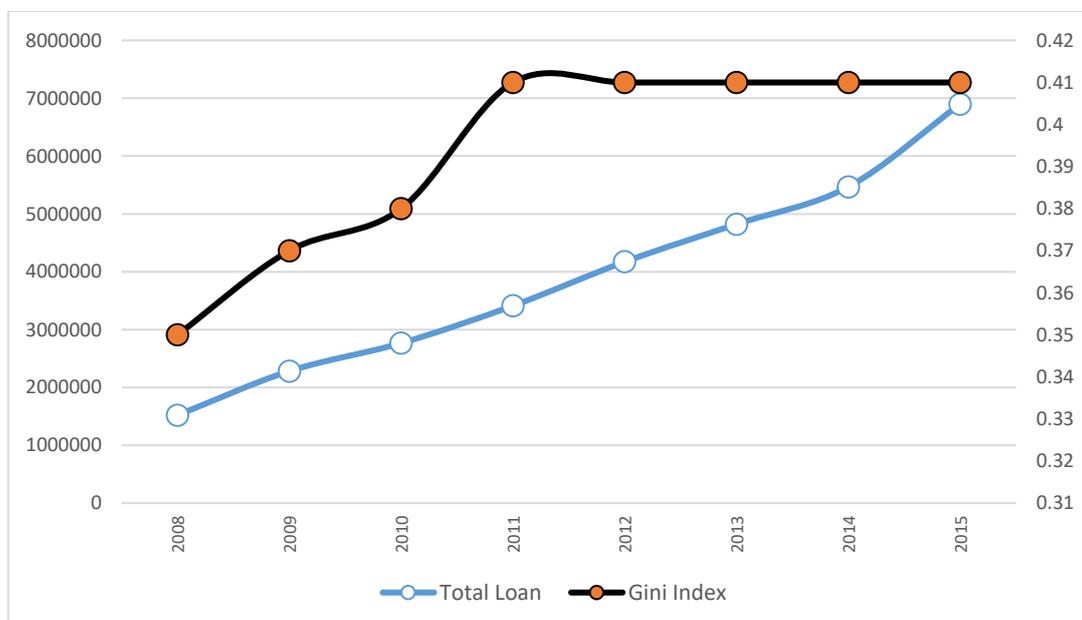
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian spesifikasi Hausman terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui pendekatan apa yang lebih tepat dalam mengestimasi persamaan (1) dan (2). Setelah melakukan pengujian tersebut, diketahui bahwa pendekatan *Fixed Effect* dengan implementasi *Panel Corrected Standard Error (PCSE)* adalah yang paling baik menjelaskan perilaku variabel-variabel dalam pengamatan dibandingkan dengan *Random Effect* dan *Pooled Least Square*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

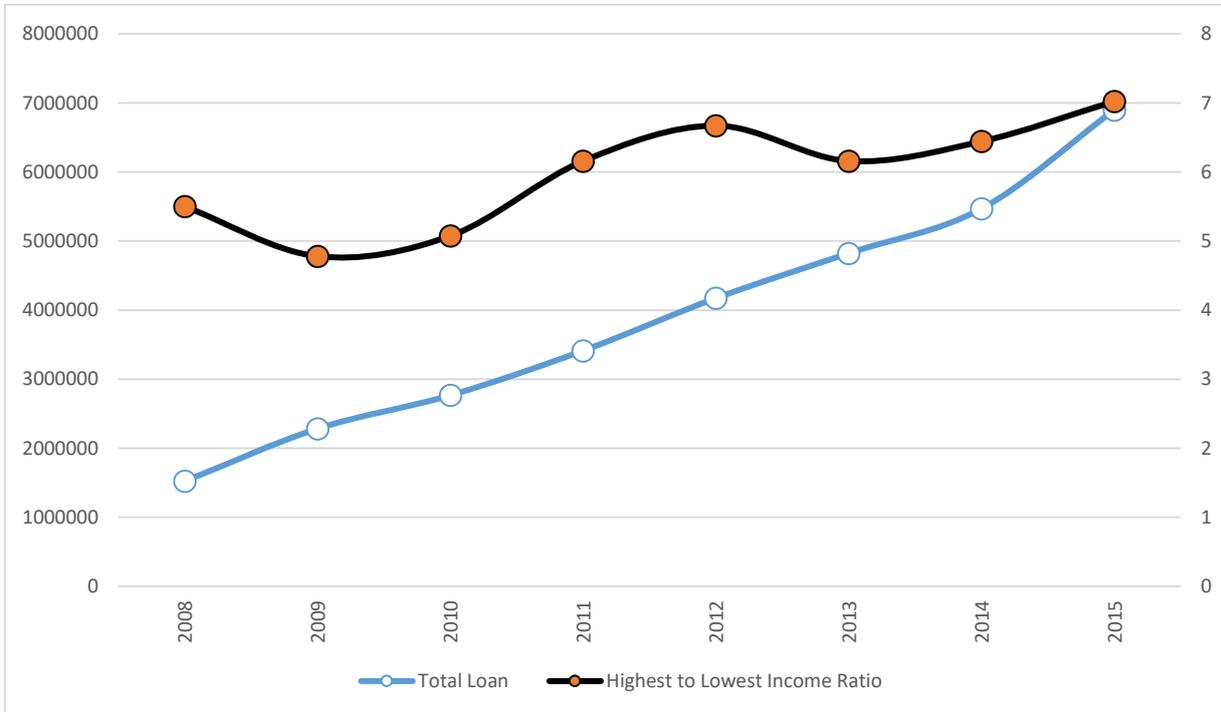
<i>Dependent Variable</i>	<i>Chi Square Statistic</i>	<i>d.f.</i>
Gini	13,7959	6
HtL	15,4547	6

Tabel 2 memperlihatkan hasil pengujian Hausman untuk mengetahui pendekatan yang terbaik dalam menganalisa perilaku variabel Gini dan HtL. Kedua tabel tersebut memberikan informasi bahwa hipotesis nol dari pengujian ($H_0 = \text{Random Effect}$) tidak dapat diterima ($\text{Chi square Statistic} > \text{critical value}$ pada $\alpha = 0,05$). Critical Value pada $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan 6, adalah sebesar 12,591. Oleh karena semua nilai *Chis Square Statistic* melebihi *critical value* maka dapat disimpulkan bahwa persamaan (1) dan (2) lebih baik dijelaskan dengan memanfaatkan pendekatan *Fixed Effect*.



Gambar 1. Total Pinjaman (Miliar Rp) dan Gini Index di Indonesia 2008-2015 (Bank Indonesia dan BPS, berbagai tahun)

Selama ini UMKM memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan bank, terutama dalam masalah pinjaman. Di lain pihak, UMKM adalah salah satu sektor yang telah terbukti tangguh pada saat krisis keuangan. Gambar 1 memperlihatkan trend total pinjaman yang disalurkan oleh Bank dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini. Dari Gambar 1 terlihat bahwa total pinjaman yang disalurkan oleh Bank mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2015, namun dalam waktu yang bersamaan, tingkat ketimpangan pendapatan ternyata juga mengalami peningkatan.



Gambar 2. Total Pinjaman (Miliar Rp) dan *Highest to Lowest Income Ratio* di Indonesia 2008-2015 (Bank Indonesia dan BPS, berbagai tahun)

Kondisi yang sama juga dapat ditemukan dalam hubungannya dengan *highest to lowest income ratio*, di mana kesenjangan antara pendapatan masyarakat berpendapatan tertinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah cenderung mengalami peningkatan, seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika disatu sisi, total pinjaman yang disalurkan oleh perbankan nasional meningkat, ternyata disisi lain juga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat secara umum, bahkan lebih spesifik, kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpendapatan tertinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah juga cenderung mengalami peningkatan.

Kredit yang disalurkan oleh bank terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumen. Total dari semua pinjaman tersebut pada prakteknya didominasi oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa kondisi tersebut tidak akan secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, atau bahkan berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan (sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 dan 2). Hasil estimasi persamaan (1) dan (2) dalam Tabel 4 dan Tabel 5 memberikan informasi yang menguatkan argumentasi tersebut. Dalam Tabel 4 diketahui

bahwa variasi dalam perilaku Indeks Gini dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam persamaan (1) sebesar 88%. Di lain pihak, dalam Tabel 5, didapatkan informasi bahwa variasi dalam perilaku *Highest to Lowest Income Ratio* dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam persamaan (2) sebesar 76%. Informasi tersebut memperlihatkan *goodness of fit* dari model ketimpangan pendapatan yang telah diestimasi dalam penelitian ini.

Tabel 4. Output Estimasi Persamaan (1) Variabel Dependen = Gini Index ($R^2 = 0,88$)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C	0.314	9.414	0.000
GINI(-1)	0.489	8.761	0.000
KM	-0.002	-2.143	0.033
GEDU	-0.016	-2.409	0.017
GKES	0.017	2.718	0.007
EDU	-0.001	-3.755	0.000
UNE	0.001	2.331	0.021
<i>Fixed Effects (Cross)</i>			
_NAD--C	-0.014		
_SUMUT--C	-0.013		
_SUMBAR--C	-0.015		
_RIAU--C	-0.004		
_SUMSEL--C	-0.003		
_BENGKULU--C	-0.005		
_LAMPUNG--C	-0.006		
_BABEL--C	-0.051		
_KEPRI--C	-0.006		
_DKI--C	0.039		
_JABAR--C	0.013		
_JATENG--C	0.000		
_DIY--C	0.041		
_JATIM--C	0.000		
_BANTEN--C	0.016		
_BALI--C	0.020		
_NTB--C	-0.006		
_NTT--C	-0.014		
_KALBAR--C	-0.008		
_KALTENG--C	-0.022		
_KALSEL--C	-0.013		
_KALTIM--C	-0.005		
_SULUT--C	0.016		
_SULTENG--C	-0.002		
_SULSEL--C	0.019		
_SULTRA--C	0.019		
_GORONTALO--C	0.029		
_SULBAR--C	-0.024		
_MALUKU--C	0.002		
_MALUT--C	-0.030		
_PAPBAR--C	0.031		
_PAPUA--C	-0.004		

Besaran konstanta dalam hasil estimasi persamaan 1 dalam Tabel 4 dan persamaan 2 dalam Tabel 5, secara berturut-turut menunjukkan estimasi besaran nilai Indeks Gini dan Highest to Lowest Income Ratio. Selanjutnya, dalam Tabel 4 dan Tabel 5 dikemukakan pula besaran konstanta untuk masing-masing provinsi, dimana besaran akhir untuk konstanta tiap provinsi adalah dengan menjumlahkan nilai konstanta regresi (C) dengan konstanta spesifik provinsi (Fixed Effect cross).

Tabel 5. Output Estimasi Persamaan (2); Variabel Dependen = HtL ($R^2 = 0,76$)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-0.547184	-0.473207	0.6366
HTL(-1)	0.305102	4.722255	0.0000
KM	-0.0223	-3.729767	0.0003
GEDU	-0.959955	-3.852182	0.0002
GKES	1.029221	4.282013	0.0000
EDU	0.058004	4.162674	0.0000
UNE	0.036502	2.623013	0.0094
Fixed Effects (Cross)			
_NAD--C	-1.072563		
_SUMUT--C	-0.828045		
_SUMBAR--C	-0.741677		
_RIAU--C	-0.544192		
_SUMSEL--C	-0.385921		
_BENGKULU--C	-0.624747		
_LAMPUNG--C	-0.698333		
_BABEL--C	-1.232235		
_KEPRI--C	-0.229274		
_DKI--C	1.149379		
_JABAR--C	0.55284		
_JATENG--C	-0.193211		
_DIY--C	1.134817		
_JATIM--C	-0.398001		
_BANTEN--C	0.61822		
_BALI--C	0.311251		
_NTB--C	-0.298945		
_NTT--C	-0.220232		
_KALBAR--C	-0.138952		
_KALTENG--C	-0.273527		
_KALSEL--C	-0.312819		
_KALTIM--C	-0.780469		
_SULUT--C	0.294038		
_SULTENG--C	-0.0053		
_SULSEL--C	0.771886		
_SULTRA--C	0.348509		
_GORONTALO--C	1.49552		
_SULBAR--C	0.134602		
_MALUKU--C	-0.210711		
_MALUT--C	-1.18129		
_PAPBAR--C	1.564814		
_PAPUA--C	1.994569		

Berdasarkan informasi yang merujuk pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa jika tanpa dipengaruhi oleh variabel lain, maka Indeks Gini tertinggi di Indonesia dimiliki oleh provinsi DI. Yogyakarta (0,355), provinsi DKI Jakarta (0,353), provinsi Papua Barat (0,345). Sedangkan untuk Highest to Lowest Income Ratio atau HtL (dengan skema perhitungan yang sama dengan Tabel 4), maka provinsi-provinsi yang memiliki HtL tertinggi adalah provinsi Papua (1,447), provinsi Papua Barat (1,017), dan provinsi Gorontalo (0,948). Di lain pihak, merujuk pada Tabel 4, diketahui bahwa konstanta total untuk provinsi Bangka Belitung (0,263), provinsi Maluku Utara (0,284), dan provinsi Sulawesi Barat (0,290), menempatkan ketiga provinsi tersebut sebagai provinsi yang memiliki Indeks Gini paling rendah. Tabel 5 memberikan informasi bahwa konstanta total HtL paling rendah dimiliki oleh provinsi Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Implikasi atas nilai-nilai konstanta total yang rendah dimiliki oleh provinsi-provinsi dalam Tabel 4 dan Tabel 5 adalah tidak diperlukan perubahan yang lebih tinggi dalam variabel independen (yang memiliki tanda koefisien negative pada tiap persamaan) dalam menurunkan Indeks Gini dan Highest to Lowest Income Ratio dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang memiliki nilai konstanta total yang lebih tinggi.

Analisis regional dengan merujuk pada Tabel 4 dan Tabel 5, berdasarkan nilai konstanta total, menunjukkan bahwa regional pulau Jawa (0,332) secara rata-rata memiliki Indeks Gini tertinggi di Indonesia, yang kemudian disusul oleh regional pulau Papua (0,327). Di lain pihak, dalam konteks Highest to Lowest Income Ratio, yang memiliki besaran tertinggi adalah regional pulau Papua (1,232)

Ditemukan bahwa kredit UMKM memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, bersama dengan tingkat partisipasi sekolah, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Hal yang sama juga ditemukan dalam Beck, Kunt & Levine (2007), di mana penyaluran kredit yang tinggi dapat mempercepat penurunan tingkat ketimpangan. Meyer (1998) juga mengungkapkan bahwa sumber permodalan usaha kecil akan sangat bergantung pada penyaluran kredit dari perbankan.

Hasil estimasi linier dengan intuisi ekonomi dan sisi praktis. Penyaluran kredit mikro cenderung mengoreksi distribusi pendapatan menjadi lebih baik, atau dengan kata lain, mengurangi ketimpangan pendapatan. Jumlah kredit mikro yang lebih tinggi dapat meningkatkan aktivitas dan output sektor usaha mikro. Selanjutnya, meningkatkan output secara berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Saat ini, banyak sektor bisnis mikro mempekerjakan pekerja informal. Pencairan pinjaman perbankan sebagai bentuk pembukaan akses perbankan ke UMKM dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Secara rata-rata, untuk tiap provinsi, peningkatan 10% dari rasio kredit UMKM terhadap PDRB dapat menurunkan indeks Gini sebesar 0,02 poin indeks. Kondisi ini disadari karena mayoritas pelaku di sektor UMKM adalah anggota kelompok berpenghasilan terendah. Dari persamaan (2), ditemukan bahwa secara rata-rata untuk tiap

provinsi, peningkatan 10% dari rasio kredit UMKM terhadap PDRB dapat menurunkan *highest to lowest income ratio* sebesar 0,22%.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sangat diarahkan untuk mendanai pendidikan dasar, dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua orang Indonesia. Hal ini relevan dengan Program Pendidikan Dasar Wajib (Wajardikdas), yang saat ini diamanatkan untuk mencapai pencapaian pendidikan dasar 12 tahun. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sensitivitas Indeks Gini dan *highest to lowest income ratio* terhadap rasio pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap PDRB, secara rata-rata untuk tiap provinsi menunjukkan hal yang sama.

Peningkatan 10% dalam rasio pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan terhadap PDRB, secara signifikan mampu mengurangi Indeks Gini sebesar 0,16 poin indeks. Di sisi lain, kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpendapatan tertinggi dengan terendah mampu berkurang sebesar 0,96% pada saat terjadi peningkatan 1% dalam rasio pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap PDRB. Hasil tersebut mengonfirmasi penelitian Mello & Tiongson (2006) dan Anderson et al (2016), di mana pengeluaran pemerintah dalam bidang sosial dan kesejahteraan dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan.

Di antara jenis-jenis pengeluaran untuk pendidikan langsung adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan, pelatihan (dalam bentuk barang), dan dana yang tertanam dalam program jaminan sosial seperti Program Cerdas Indonesia. (Program Indonesia Pintar), Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan). Dua yang terakhir adalah program yang diuji coba yang dimaksudkan untuk membantu kelompok berpenghasilan terendah. Program seperti ini membantu keluarga miskin dalam meringankan beban dana sekolah. Sedangkan untuk rumah tangga terkaya dengan anak usia sekolah, tidak ada hubungannya dengan alokasi ini. Dalam pandangan sumber daya manusia, peningkatan pengeluaran pendidikan berarti investasi yang lebih tinggi dalam sumber daya manusia. Dalam jangka panjang keadaan ini akan memperluas akses ke pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemungkinan memasuki pasar kerja, dan mendapatkan gaji yang lebih layak. Perluasan akses masyarakat miskin dapat menjadi cara untuk meningkatkan distribusi pendapatan dalam jangka panjang.

Rasio pengeluaran kesehatan terhadap PDRB cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan. Dalam kasus ini, secara rata-rata untuk tiap provinsi, peningkatan 1% dalam rasio pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap PDRB, dapat meningkatkan ketimpangan sebesar 0,017 poin indeks. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena durasi penelitian yang cukup singkat.

Secara umum, setiap provinsi termotivasi untuk menetapkan pengeluaran kesehatan mereka untuk memenuhi jumlah 10% dari anggaran. Namun realisasi pengeluaran kesehatan sulit untuk memenuhi jumlah itu. Masalah lainnya adalah sebagian besar dari jumlah ini dialokasikan untuk gaji. Di antara fungsi kesehatan, anggaran jauh lebih

dialokasikan untuk kuratif, dan menyisakan tiga fungsi lainnya (preventif, promotif, dan rehabilitatif) rendah. Kondisi seperti ini, akan membatasi fungsi anggaran kesehatan untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal. Namun, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan menunjukkan efek yang menarik, yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan.

Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) pada tahun 2014 (dua tahun dari sebelum akhir periode pengamatan) belum dapat diketahui dampaknya dalam penelitian ini. Pada saat itu, seluruh program asuransi kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Serupa dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggung jawab untuk membayar biaya JKN untuk masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat (Penerima Bantuan Iuran - PBI).

Tingkat partisipasi sekolah merupakan gambaran kualitas pendidikan di masyarakat. Peningkatan dalam tingkat partisipasi sekolah sebesar 10% dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,01 poin indeks (hal ini berlaku secara rata-rata untuk setiap provinsi). Di sisi lain, peningkatan angka pengangguran dapat memperburuk kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Pengangguran yang tinggi, *ceteris paribus*, dapat dikaitkan dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Sejak tahun 2009, Indonesia telah mengalami peningkatan jumlah pekerja formal untuk pertama kalinya selama dua dekade terakhir. Pekerja formal mendapatkan tunjangan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja informal, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang.

Meningkatnya komposisi pekerja formal merupakan indikasi membaiknya kondisi pasar tenaga kerja, di sisi lain, justru membuat distribusi pendapatan semakin memburuk. Ini terjadi karena kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal selalu tinggi. Secara rata-rata untuk tiap provinsi, peningkatan pengangguran sebesar 10% dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,01 poin indeks. Di lain pihak, peningkatan variabel yang sama sebesar 10% akan meningkatkan highest to lowest income ratio sebesar 0,36%.

SIMPULAN

Intermediasi keuangan harus dapat memberikan peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha UMKM. Hasil empiris menemukan bahwa peningkatan distribusi kredit ke sektor UMKM dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, dan kesenjangan antara kelompok terkaya dan terendah, rata-rata di setiap provinsi di Indonesia. Salah satu kendala dalam penyaluran kredit sektor UMKM adalah masih rendahnya kemampuan manajemen keuangan pengusaha dalam sektor tersebut. Pemerintah dapat bekerja sama dengan akademisi dalam upaya memperluas wawasan pengusaha-pengusaha sektor UMKM dalam bentuk pelatihan-pelatihan manajemen keuangan dengan tujuan membuat usahanya mampu memenuhi syarat perbankan untuk memperoleh kredit. Peningkatan dalam skala usaha pada sektor UMKM selanjutnya dapat memperluas lapangan pekerjaan, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki ketimpangan yang cukup tinggi.

Konsistensi pemerintah dalam memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam anggarannya perlu selalu diperhatikan. Alokasi anggaran tersebut perlu difokuskan pada penyaluran kepada masyarakat, bukan hanya yang bersifat anggaran rutin. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan ditemukan dapat secara signifikan menurunkan ketimpangan. Namun, pada pelaksanaannya, perlu diupayakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasannya. Upaya meningkatkan akses ke sektor pendidikan juga diharapkan terus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut penting untuk dilakukan dalam upaya mencapai target pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Keseimbangan ketersediaan sekolah dan guru di seluruh daerah di setiap provinsi juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kondisi yang sama juga perlu diperhatikan dalam penyaluran pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, di mana pendataan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah perlu terus diperbaharui. Kondisi tersebut dapat menciptakan penyaluran pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinbobola, T.O. & Saibu, M.O.O. (2004). Income inequality, unemployment, and poverty in Nigeria: a vector autoregressive approach. *The Journal of Policy Reform*, 7(3), 175–183.
- Anderson, E., D'Orey, M.A.J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2016). Does Government Spending Affect Income Inequality? a Meta-Regression Analysis. *Journal of Economic Surveys*, 0(0), 1–27.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.
- Clarke, G., Heng-fu, Z. & Xu, L.C. (2003). Finance and Income Inequality: Test of Alternative Theories. *Policy Research Working Paper Series 2984*, The World Bank.
- Clarke, G.R.G., Xu, L.C. & Zou, H. (2006). Finance and Income Inequality: What Do the Data Tell Us? *Southern Economic Journal*, 72(3), 578–596.
- Duman, A. (2008). Education and Income Inequality in Turkey: Does Schooling Matter? *Financial Theory and Practice*, Institute of Public Finance, 369–385.
- Gimet, C. & Lagoarde-Segot, T. (2011). A closer look at financial development and income distribution. *Journal of Banking and Finance*, 35(7), 1698–1713.
- Greenwood, J. & Jovanovic, B. (1990). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. *The Journal of Political Economy*, 98(5), 1076–1107.
- Indriyatni, L. (2013). Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Usaha Kecil di Semarang Barat). *Jurnal STIE Semarang*, 5(1), 54–70.
- Jauch, S. & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: a panel data approach. *Empirical Economics*, 51(1), 291–314.
- Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. *Proceedings of the German Development Economics Conference 2010*, Hannover.

- Li, H., Squire, L. & Zou, H. (1998). Explaining International and Intertemporal Variations in Income Inequality. *The Economic Journal*, 108(446), 26–43.
- Liang, Z. (2006). Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis With Application To Urban China. *Journal of Economic Development*, 31(2), 1–21.
- Liu, G., Liu, Y. & Zhang, C. (2016). Financial Development, Financial Structure and Income Inequality in China. *World Econ*, 40: 1890-1917.
- Mello, L. de & Tiongson, E.R. (2006). Income Inequality and Redistributive Government. *Public Finance Review*, 34(3), 282-305.
- Meyer, L. (1998). The present and future roles of banks in small business finance. *Journal of Banking & Finance*, 22(6–8), 1109–1116.
- Mocan, H.N. (1999). Structural Unemployment, Cyclical Unemployment and Income Inequality. *The Review of Economics and Statistic*, 5(2), 122–134.
- Monnin, P. (2014). Inflation and Income Inequality in Developed Economies. *Working Papers 1401*, Council on Economic Policies.
- Narob, N. (2015). Income Inequality and Inflation in Developing Countries: An Empirical Investigation. *Economics Bulletin*, 35(4), 2888–2902.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Park, K.H. (1996). Educational expansion and educational inequality on income distribution. *Economics of Education Review*, 15(1), 51–58.
- Qazi, W., Syed Ali Raza., Syed Tehseen Jawaid & Mohd. Zaini Abd Karim. (2016). Does expanding higher education reduce income inequality in emerging economy? Evidence from Pakistan. *Studies in Higher Education*, 5079(5), 1–21.
- Rahmayanti, Y. (2012). *Government Expenditure Efficiency, Economic Growth and Income Inequality: Evidences from Developing Countries and Indonesia*. Osaka: Osaka University.
- Ram, R. (1989). Can educational expansion reduce income inequality in less-developed countries? *Economics of Education Review*, 8(2), 185–195.
- Sehrawat, M. & Giri, A.K. (2016). Panel data analysis of financial development, economic growth and rural-urban income inequality. *International Journal of Social Economics*, 43(10), 998–1015.
- World Bank. 2012. *The Little Data Book on Financial Inclusion 2012*. Washington DC: The World Bank.